

PEMKAB MURA SEDIAKAN LAHAN 10.000 HEKTARE UNTUK PERTANIAN PADI GOGO



Sumber gambar: <https://kalteng.antaranews.com>

Puruk Cahu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah menyediakan lahan seluas 10.000 hektare, sebagai upaya meningkatkan produksi pertanian, khususnya tanaman padi jenis Gogo. Penjabat Bupati Murung Raya, Hermon saat acara penanaman perdana padi gogo di Desa Oreng Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kamis, mengatakan varian padi tersebut dianggap sangat cocok ditanami di wilayah Murung Raya yang memiliki kontur tanah perbukitan.

Kegiatan manugal atau menanam padi gogo ini sejalan dengan program strategis pertanian yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu program pertanian dijadikan prioritas," ucapnya. Adapun kegiatan itu sendiri dihadiri unsur Forkopimda, Penjabat Sekda, Kepala OPD, Camat, Kepala desa se Murung Raya serta juga Direktur Perlindungan Perkebunan, pada Kementerian Pertanian RI Hendratmojo Bagus Hudoro.

Dalam kesempatan itu Hermon juga menyampaikan terkait pengembangan cetak sawah 3 juta hektar, untuk Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan jatah 930.000 hektare, terkhusus Kabupaten Murung Raya adalah 23.000 hektare. Namun, karena Murung Raya belum mampu memenuhi target cetak sawah tersebut, maka pengembangan padi ladang atau gogo ini dijadikan sebagai alternatif menjadi sawah tadah hujan.

Untuk itu, dengan adanya program dan dukungan pemerintah seperti yang dilakukan saat ini, menurut Hermon lagi akan memberi semangat, bagaimana melakukan pertanian modern tanpa meninggalkan kearifan lokal. Pada dasarnya fasilitas yang ada belumlah maksimal. Mulai dari keterbatasan pupuk mendukung pertumbuhan padi gogo, lat berat atau mesin pertanian untuk pengolahan lahan maupun pasca panen, serta lainnya," beber Hermon.

Pj Bupati Murung Raya itu pun berharap kegiatan ini terus berlanjut dan Pemerintah Pusat, provinsi, Kabupaten dan unsur Forkopimda terus bersinergi untuk

menjadikan Kabupaten Murung Raya lumbung pangan Nasional, khususnya padi Gogo/padi lahan kering, terutama ketahanan swasembada pangan jadi kenyataan.

Sementara itu, Direktur Perlindungan Perkebunan Hendratmojo Bagus Hudoro menyampaikan program Kementerian Pertanian saat ini, termasuk diantaranya pengembangan padi lahan kering/padi gogo dan upaya bersama, untuk swasembada dan ketahanan pangan dapat tercapai dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. Kami mengajak seluruh elemen dan stakeholder untuk bersama-sama bergandengan tangan, bahu-membahu untuk mewujudkan pengembangan padi Gogo 10.000 hektare di kabupaten Murung Raya tahun 2024," demikian Hendratmojo.

Sumber Berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/berita/719587/pemkab-mura-sediakan-lahan-10000-hektare-untuk-pertanian-padi-gogo>, Jumat 27 September 2024
2. <https://kalteng.bsip.pertanian.go.id/berita/kabupaten-murung-rama-gelar-tanam-padi-gogo-perdana-di-desa-oreng>, Rabu 25 September 2024

Catatan:

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2014 mengatur bahwa:

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
- (2) Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan diketuai oleh gubernur untuk Daerah provinsi, oleh bupati/wali kota untuk Daerah kabupaten/kota, dan oleh camat untuk Kecamatan.
- (3) Anggota Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- (4) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- (5) Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.